DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS v

LEMBAR CURRICULUM VITAE vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Definisi Operasional 14

F. Metode Penelitian 16

G. Kerangka Penulisan 21

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Korupsi 23

A.1. Pengertian Tindak Pidana 23

A.2. Unsur Tindak Pidana 25

A.3. Jenis Tindak Pidana 27

A.4. Tindak Pidana Korupsi 35

A.4.1. Pengertian Korupsi 35

A.4.1.1. Perspektif Politik 39

A.4.1.2. Perspektif Sosiologis 39

A.4.1.3. Perspektif Yuridis 42

A.5. Faktor Penyebab Korupsi 44

A.6. Dampak Korupsi 46

A.7. Gambaran Umum tentang Korupsi di Indonesia 51

B. Tindak Pidana Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian 55

B.1. Pengertian Pembuktian 55

B.2. Teori-Teori dalam Sistem Pembuktian 56

B.3. Sistem Pembuktian dalam KUHAP 59

B.4. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi 60

B.5. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi dan Problematika Hukumnya 63

B.6. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Konvensi PBB dan Sistem Hukum di Berbagai Negara 68

B.6.1. Pembalikan Beban Pembuktian di Hongkong 70

B.6.2. Pembalikan Beban Pembuktian di Malaysia 71

B.6.3. Pembalikan Beban Pembuktian di Singapura 74

B.6.4. Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia 75

C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pembalikan Beban Pembuktian 79

C.1. Pengertian Hukum Pidana Islam 79

C.2. Tujuan Disyariatkannya Hukum Pidana Islam 79

C.3. Konsep Jarimah dalam Hukum Pidana Islam 82

C.4. Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam 83

C.5. Konsep Pembalikan Beban Pembuktian menurut Perspektif Hukum Islam 86

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prospek Perluasan Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Upaya Otimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ... 94

B. Kendala Perluasan Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Upaya Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .. 105

C. Formulasi dan Konsep Hukum Perluasan Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Upaya Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 110

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 116

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA 121